KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Syahrul Ramadhan Rasyid

90500120112

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andifajar2801@gmail.com

Abstrak

I created this article to discuss and examine the concept of ownership in Islamic economics. about God who is the true owner of the universe, and also the role of humans in terms of ownership and do not have any property. This research method uses descriptive analytical. The results and discussion of this paper includes that Allah is the owner of everything in this universe, as humans who from the beginning have no property in the Humans around the world should understand and use the gifts that have been given by the creator. We humans actually only play a role in managing existing resources. As humans, we must maintain, care for and manage anything well because it has been entrusted or mandated by Allah and all our actions that can damage will be held accountable in the form of painful torture. Everything that lies on the face of the earth from the east to the west has been provided by Allah as good as possible with various pleasures that can be utilized by humans. As humans who are trusted to preserve existing resources, we must be able to use them properly.

Kata Kunci: kepemilikan, ekonomi, syariah, Islam.

PENDAHULUAN

Masalah kepemilikan diatur secara luas dalam fiqih muamalah bidang al-mal (harta benda) dan Al milk (milik). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak atau milik seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis.

Dalam Islam hak milik pribadi dan milik umum itu diakui ada dan juga menghormati hak milik, serta didalam Islam juga terdapat aturan-aturannya. Penghormatan Islam terhadap adanya hak milik tercermin secara nyata dalam konsep *Haq al-adami*, disamping itu perlindungan keselamatan hak milik pribadi pun diberikan Islam dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang yang merampas nya aku, baik melalui cara pencurian atau perampokan (Gdodp et al., n.d.).

Didalam Islam kepemilikan atas alam serta sumber daya alam yang ada didalamnya sepenuhnya merupakan kepemilikan Allah SWT dan manusia hanya diberikan kuasa untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut, karena manusia dipercayakan untuk hal tersebut.

Sebagai salah satu sistem kehidupan yang ada di dunia, hukum-hukum yang ada didalam agama Islam dipercaya oleh semua pemeluknya sebagai pengatur segala unsur kehidupan yang ada didunia, termasuk mengenai hukum kepemilikan. Islam senantiasa memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan-Nya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia (Akbar, 2012).

Secara historis, persoalan kepemilikan sebenarnya telah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama di muka bumi ini. Kepemilikan terhadap sesuatu pada saat itu, hanya sekedar penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pada saat itu, kepemilikan hanya dianggap atau hanya sekedar penggunaan suatu barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini dikarenakan pada zaman itu atau pada saat itu jumlah manusia masih sedikit dan tidak sebanyak pada saat ini, sedangkan kebutuhan hidup mereka sangat banyak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sedikit demi sedikit jumlah manusia mulai bertambah dan memenuhi penjuru bumi. Ketika itu mulailah persaingan guna mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka sejak ini mulai pergeseran makna kepemilikan yang awalnya hanya penggunaan untuk

memenuhi kebutuhan hidup, menjadi kewenangan dan kekuasaan, saat ini muncul istilah kepemilikan (property), atau dikenal juga dengan “almilkiyyah”.

PEMBAHASAN

Pemilik sesungguhnya dari sumber daya yang ada adalah Allah SWT, manusia dalam hal ini hanya penerima titipan untuk sementara saja. Sehingga sewaktu-waktu dapat di ambil

kembali oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kepemilikan mutlak atas harta tidak di akui dalam Islam. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia dan agar manusia itu tidak melanggar hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Masalah kepemilikan sekarang ini masih menjadi perselisihan. Ada yang menganggap milik nasional dan masyarakat harus mengakui bahwa pemerintah lah yang memiliki semua sumber. Ada juga yang memperlakukan sebagai milik perorangan, sehingga setiap orang bisa menikmati kebebasan hak memiliki. Kepemilikan sebagai persoalan ekonomi mendapat perhatian yang cukup besar dalam islam.

Pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah. Manusia hanya di beri kesempatan untuk menjalankan dalam bentuk amanat. Islam menggariskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami dalam dunia dimensi, kepemilikan umum, dan khusus. Kepemilikan umum berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan khusus merupakan pengejawantahan sebagai makhluk individu. Manusia harus diberikan ruang yang sama untuk mengakses sumber kekayaan umum. Tidak ada pembedaan hirarkhis mengingat manusia mempunyai kedudukan sama dihadapan Tuhan. Hanya ketakwaan, dan kepatuhan terhadap demarkasi ketetapan Tuhan yang membedakan manusia. Dalam hal ini, kreativitas dan kapasitas personal memiliki peran penentu dalam mewujudkan kesejahteraan dari usaha pemanfaatan kekayaan alam yang telah disediakan oleh Tuhan.

Karakter makhluk sosial bukanlah hal dominan yang berkembang dalam diri manusia. Pada saat tertentu, manusia menunjukkan sisi lainnya yaitu sikap egois dan tidak memperdulikan orang lain yang merupakan pengejawantahan sisi sebagai makhluk hidup. Bahkan dalam batas-batas tertentu, manusia dapat saling menjatuhkan dan menyingkirkan orang lain. Sebagai perimbangan, harus ada institusi sosial yang mengatur dan memberikan regulasi dalam relasi sosial.

Secara bahasa kepemilikan berasal dari kata milik yang memiliki arti pendapat seseorang yang diberikan wewenang untuk mempergunakan harta yang dikuasai orang lain dengan syarat dia harus memperhatikan pihak yang menguasainya. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki suatu barang berarti mempunyai kekuasaan atas barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada orang lain baik secara individual maupun kelembagaan yang dapat

menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya tersebut (Gunawan, 2017).

Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh RaghibalAshfihani adalah "Pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 adalah : "Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi. Milik menurut pendapat para ahli fiqh sebagaimana yang didefinisikan oleh alQurafi adalah "Hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu" Menurut ulama "syar"i.

Kata ekonomi pada awalnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu eko=oikos dan Nomi=nomos. Kata oikos memiliki makna rumah tangga sedangkan kata nomos berarti mengelola/mengatur. Maka bisa dikatakan bahwa ekonomi berarti mengelola dan mengatur urusan rumah tangga atau keluarga (Ekonomi & Doi, 1866).

Sedangkan menurut istilah dalam bahasa Arab ekonomi berarti "al-iqtishad". AlIqtishad berasal dari akar kata qashada yang mempunyai makna keseimbangan. Pada kata qashada itu, jadi Iqtishada yang bermakna kepada arah keseimbangan, kejujuran dan keharmonisan.

Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu arah atau suatu jalan menuju keseimbangan ekonomi yang bisa menimbulkan kejujuran dan keharmonisan, yang diatur oleh Al-Qur'an yang dimana kurang lebih 120 ayat didalamnya membahas tentang ekonomi Islam tersebut. Al-qur'an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (Q.S. Ali Imran, 3: 189) manusia hanyalah kafilah Allah di muka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu (Kholil, 2016) :

1. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
2. Pembayaran zakat sebanding dengan harat yang dimiliki
3. Penggunaan harta benda secara bermanfaat
4. Penggunaan harta benda yang tidak merugikan orang lain.
5. Memiliki harta benda yang sah
6. Tidak menggunakan harta dengan boros dan serakah
7. Harta benda tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan atas haknya
8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam

Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi/individu terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya.

Berangkat dari ketentuan syariat mengenai kaidah-kaidah khusus kepemilikan, yakni:

- (1) Benda tersebut memiliki manfaat untuk pemiliknya
- (2) Pemilik pertama merupakan pemilik sempurna,
- (3) Kepemilikan benda tidak ditentukan waktunya, sedangkan kepemilikan manfaat pada dasarnya ditentukan waktunya,
- (4) Kepemilikan benda tidak dapat digugurkan, tapi hanya dapat dipindahkan
- (5) Kepemilikan yang berkembang pada harta berupa benda pada asalnya dapat menerima tasarruf,
- (6) Kepemilikan yang berkembang pada hutang yang diperserikatan dan dia berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi.

Prinsip dasar kepemilikan paling tidak terdapat 2 (dua) yang diungkapkan dalam alQuran yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu waTa'ala. Hal ini dapat dilihat diantaranya dalam QS. Ali – Imran (3) ayat 189 dan QS. Al-Mulk (67) ayat 1. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Yasin(36) ayat 71. Berkaitan dengan ayat tersebut maka ada beberapa cara yang dilakukan manusia mendapatkan hak kepemilikan, antara lain :

- 1) Manusia atau seorang muslim hanya boleh memanfaatkan sumber daya tersebut dan tidak memiliki hak untuk menguasai sumber daya tersebut.

- 2) Hak milik hanya berlaku jika seseorang itu masih hidup, dan jika sang pemilik tersebut sudah meninggal maka hak milik tersebut jatuh kepada ahli warisnya.
- 3) Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

Kedua, Diperbolehkan mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah Subhanahu waTa'ala. Al-Quran tidak menentang kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan al-Quran secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezeki.

Hukum syariah menetapkan pula cara atau sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu yakni (Putri Nuraini, 2020):

a. Bekerja

Didalam Islam manusia didorong untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT. Dengan catatan pekerjaan yang dia lakukan haruslah sejalan dengan yang diajarkan didalam Islam sehingga harta yang dia dapatkan dapat bernilai berkah dan halal untuk dia pergunakan. Alquran telah memberi tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta dengan semua cara yang batil yang tidak diperkenankan Allah SWT. IbnKatsîr (1999) menjelaskan usaha yang dilakukan dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan ajaran syariat, seperti judi, penipuan dan riba.

b. Pewarisan

Waris merupakan suatu mekanisme pembagian harta milik orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan syariah Islam, ahli waris dapat memiliki harta warisan sebagai hak bagian harta waris yang ada. Hukum tentang waris telah dijelaskan secara qath'i (tegas) didalam al-Quran dan AsSunnah serta Ijmak sahabat. Hukum waris termasuk kategori hukum tawqifi (ketentuan hukum yang bersifat tetap dari Allah Subhanahu waTa'ala) tanpa disertai adanya 'illat (sebab ditetapkan hukum) apapun.

c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

Hidup adalah hak setiap manusia. Menjadi hak manusia pula untuk mempertahankan kehidupannya. Salah satunya melalui cara bekerja guna mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, negara sebagai pelindung dan penjaga rakyat wajib menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi warga Negaranya.

d. Pemberian Negara.

Negara dapat memberikan sebagian harta miliknya di Baitul Maal kepada orang yang memerlukan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan dapat berupa modal kerja, barang modal atau bahkan bahan konsumsi.

e. Harta yang diperoleh tanpa usaha apapun.

Cara kepemilikan harta seperti ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: Pertama, Hibah. Harta bisa didapat seseorang melalui hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain dari orang lain yang timbul dari hubungan pribadi antar individu yang mendorong mereka saling memberi dan menolong. Harta yang didapat melalui hadiah, hibah atau wasiat merupakan kepemilikan yang sah secara syar'i. Kedua, Zakat. Bagi orang yang menerima harta zakat, harta itu dia dapatkan tanpa Usaha. Ia menerima zakat karena keadaan dirinya yang termasuk salah satu dari Kriteria orang yang berhak menerima zakat. Ketiga, Harta kompensasi (diyat). Diyat adalah harta ganti rugi (kompensasi) dari kemuhardatan yang menimpa Seseorang, baik berwujud luka, timbulnya disfungsi organ atau hilangnya nyawa. Diyat bisa juga disebut sebagai tebusan yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada penderitanya atau kepada keluarga yang terbunuh jika mereka tidak mau menuntut qishash. Keempat, Mahar. Mahar dan segala pemberian yang diterima oleh mempelai wanita dari mempelai laki-laki sebagai salah satu rukun nikah. Dan Mahar juga merupakan suatu bentuk kepemilikan yang sah secara syariah. Kelima, Luqathah. Barang atau harta temuan seperti emas, perak, permata dan lain-lain, apabila tidak ada yang datang atau tidak ada yang dapat membuktikan bahwa barang atau harta tersebut memang miliknya maka harta temuan tersebut menjadi milik orang yang enemukannya. Keenam, Santuan Negara.

PENUTUP

Secara bahasa Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber yang menguasainya.

Ekonomi Islam adalah suatu arah atau jalan menuju keseimbangan, kejujuran dan keharmonisan yang dibingkai dalam Alquran dimana terdapat kurang lebih ada sekitar 120an ayat yang membahas tentang ekonomi sehingga memberikan petunjuk pada kita agar senantiasa selalu berada dalam tuntunan tersebut.

Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu : pemanfaatan harta, pembayaran zakat, penggunaan harta secara bermanfaat, tidak merugikan orang lain, harta benda yang dimiliki sah, tidak boros dan serakah, tidak memperoleh keuntungan atas haknya, menetapkan warisan sesuai dengan ajaran Islam.

Kaidah-kaidah khusus kepemilikan yaitu : benda tersebut memiliki manfaat untuk sang pemilik, pemilik merupakan pemilik seutuhnya, kepemilikan manfaat benda diatur waktunya, benda hanya dapat dipindahkan bukan digugurkan, dapat menerima tasarruf, bertanggung jawab.

Kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu waTa'ala. Hal ini dapat dilihat diantaranya dalam QS. Ali – Imran (3) ayat 189 tersebut dan QS. Al-Mulk (67) ayat 1. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Yasin (36) ayat 71. ada beberapa cara yang dilakukan manusia mendapatkan hak kepemilikan, antara lain :

- 1) Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi,
- 2) Hak kepemilikan hanya diberikan jika seseorang itu masih hidup,
- 3) Hak kepemilikan individu hanya boleh dipergunakan untuk individu bukan untuk kepentingan umum.

Sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu yakni: Bekerja, Pewarisan, Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, Pemberian Negara, harta yang diperoleh tanpa usaha apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar. *Ushuluddin*, XVIII(2).
- Ekonomi, J., & Doi, B. I. (1866). *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung A* .
<https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1229>
- Gdodp, O., Dpdodk, L. T. K., Kduwd, E. O., Gdq, E., Odlq, S., Pdqxvld, V., Nhfhqghuxqjddq, P., & Phqjdnxl, V. (n.d.). *0 6Xoduqr \$*. 216.
- Gunawan, A. (2017). Kepemilikan dalam Islam. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 145–158.
- Kholil, M. (2016). Faktor-Faktor Produksi Dan Konsep Kepemilikan. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 29. [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).29-35](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).29-35)
- Putri Nuraini. (2020). Studi Ayat-Ayat Ekonomi Tentang Al-Milk Serta Klasifikasi Kepemilikan. *Jurnal Islamika*, 3(2), 44–56. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2156>